

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK PENYANDANG
DISABILITAS MENJADI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILU TAHUN 2019**

(Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

A. CHANDRA DWI HASTA

NPM : 1521020253

Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iiyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H / 2019 M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK PENYANDANG
DISABILITAS MENJADI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

PADA PEMILU TAHUN 2019

(Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

A. CHANDRA DWI HASTA

NPM : 1521020253

Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun. S.H., M.A.

Pembimbing II : Frenki. M.Si.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin yang dalam praktiknya diselenggarakan oleh panitia penyelenggara pemilu salah satunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dalam penerimaan anggota PPK terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap pelamar yang mendaftarkan dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas dan mengkaji mengenai hak kaum disabilitas menjadi anggota PPK pada pemilu tahun 2019. Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah, bagaimana hak disabilitas menjadi PPK di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019 dan bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap hak penyandang disabilitas menjadi PPK di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui hak disabilitas menjadi anggota PPK di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019 dan uUntuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap hak penyandang disabilitas untuk menjadi anggota PPK di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mengumpulkan data menggunakan metode observasi (pengamatan), metode wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan datanya dengan teknik *editing, organizing, analyzing*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, hak disabilitas menjadi anggota PPK diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 (5) bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. sehingga ditetapkan salah seorang disabilitas menjadi anggota PPK Kecamatan Labuhan Ratu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perekrutan penyandang disabilitas sebagai anggota PPK Labuhan Ratu telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang memandang bahwa semua manusia adalah setara. Hal ini pula sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dalam Surat 'Abasa dan al-Hadits untuk memprioritaskan kaum disabilitas dan menyetarakan hak-hak nya sama seperti umat manusia pada umumnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin (0721) 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Hak Disabilitas Menjadi
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu
Tahun 2019 (Studi PPK Kecamatan Labuhan Ratu,
Bandar Lampung)**

**Nama : A. Chandra Dwi Hasta
NPM : 1521020253
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

**Dr. Maimun. S.H., M.A
NIP. 196003291987031003**

Pembimbing II,

**Frenki, M.Si
NIP. 19800315009011002**

Ketua Jurusan Siyasah

**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005**



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin (0721) 703260 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Disabilitas
Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu Tahun
2019 (Studi PPK Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung) disusun oleh
Nama: A. Chandra dwi hasta NPM : 1521020253 Program Studi : Siyasah
Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Henry Irwansyah, M.A

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.H

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Frenki, M.Si

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 19621022199301002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (Q.S. An-Nahl (16):90)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.



PERSEMBAHAN

Sujud syukur Ku persembahkan pada Allah Yang Maha Kuasa, terimakasih atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, berkat rahmat dan detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi saya pada orang-orang tersayang :

1. Kedua orang tua saya ayahanda Saudin dan ibunda Darmalia tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, mendidik saya sejak dari kecil hingga dewasa seperti ini, terimakasih ku persembahkan atas jasa, perjuangan dan pengorbanan dalam hidup ini. Serta senantiasa mendo"akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat do"a restu keduanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

2. Untuk Kakakku Afryan suganda terimakasih selalu memberiku motivasi dan Adikku Maya marisca semoga gelar ini bisa menjadi motivasi untukmu supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.

3. Untuk seluruh sahabat-sahabatku yang telah menemani, mengajari, memotivasi, memberikan semangat dan do'a dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih untuk semuanya terimakasih telah sabar menungguku hingga study ku lulus. Semoga kita bisa bersama-sama sukses untuk masa depan yang cerah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tulang Bawang 24 oktober 1996. Dengan nama lengkap A. Chandra Dwi Hasta. Putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Saudin dan Darmalia. Berikut riwayat pendidikan penulis :

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Kampung Baru Bandar Lampung pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 8 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2012.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 15 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015.
4. Kemudian masih dalam tahun yang sama pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi *Siyasah Syari'ah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syaria'ah, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof, Dr. Moh. Mukri, M.Ag
2. Dr. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Nurnazli, SH, S.Ag, M.H.Selaku ketua Jurusan Siyasah, Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Frenki M.Si selaku Sekertaris jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas syaria'ah dan sekaligus selaku Pembimbing II yang mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.
5. Dr.Maimun S.H., M.A. selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberi motivasi penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
7. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Syariah khususnya jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat SMA (Hayati, rio, naya, ocid, barius, deyek, adam, totok, bagas, wisnu, izon)
9. Sahabat-sahabat kampusku Rsnanda fajri S.H Ayuni antenar S.H Sheila pertiwi K S.H Ifanda S.H Visca ayuni S.H
- 10 Sahabat-sahabat grup G-STRING (mang suhar, mang nunu, mang muki. Om aulif , leman, tokeke, surya)
- 11.Sahabat-sahabat grup mitra(rio,rizki,rian,ocid,ivan,dedi,joni,reza,adam,mawan wisnu)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-

saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do" a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman- teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.



Bandar Lampung, 26 November 2019

A.Chandra Dwi Hasta

1521020253

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	2
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilihan Menurut Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Hak Dzawil Ahat	15
2. Dasar Hukum Tentang Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilihan	21
3. Syarat-Syarat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilihan	30
4. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilihan	33
B. Tinjauan Pustaka	40

BAB III ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG PADA PEMILU

TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Pada Pemilu Tahun 2019	42
B. Dasar Hukum Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.....	58
C. Syarat-Syarat Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung	64
D. Proses Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Pada Pemilu Tahun 2019...	66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Hak Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Pada Pemilu Tahun 2019	71
B. Hak Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Pada Pemilu Tahun 2019 Menurut Fiqh Siyasah.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi di kalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, yaitu Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Hak penyandang disabilitas Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung). Maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil peninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Hak penyandang disabilitas adalah wewenang setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 105.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

³Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah Badan yang melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁴

Pemilu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat di suatu negara untuk memilih wakil rakyat.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah peneliti ingin mengkaji suatu kajian tentang hak kaum disabilitas menjadi panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pada Pemilu 2019 kemudian di tinjau menurut *fiqh siyasah*.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul skripsi tersebut adalah pada musim pemilu tahun 2019 tingkat keikutsertaan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilu sangat rendah sekali, banyak ditemukan penyandang disabilitas seolah-olah tidak diberi kepercayaan untuk menjadi anggota pemilihan umum, padahal mengacu pada Pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 yang berbunyi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan untuk ikut serta menyelenggarakan pemilu.

C. Latar Belakang

Pada sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus

⁴Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pasal 53 Tentang Pemilu

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1099.

merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.⁶

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa.

Hak politik penyandang disabilitas secara jelas telah diatur dalam pasal 5 poin H dan pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016, yakni hak untuk mendapatkan Pendidikan politik, mereka berhak untuk mengikuti proses berpolitiknya sebagai peserta, berhak untuk memilih, berhak menyalurkan

⁶KPU, Fondasi Tata Kelola Pemilu. (On-Line), tersediadi : <http://www.kompas-cetak/0108/05/FondasiTataKelolaPemilu> (di akses pada tanggal 21 Februari 2019)

aspirasi politiknya secara terbuka baik lisan maupun tulisan.⁷ Berhak untuk menjadi anggota sekaligus pengurus partai politik, mereka juga dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu sekaligus juga memperoleh aksesibilitas pada pemilihan umum.

Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi hal tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk untuk mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.⁸

Pada kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Salah satu kesulitan yang dihadapinya dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya.

Pada perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*. Orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Politik.

⁸Tony Prasetyantono. Hak asasi manusia. (On-Line), tersediadi : <http://www.kompas-cetak/0108/05/HakAsasiManusia> (di akses pada tanggal 21 Februari 2019)

Lebih spesifik al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَاةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(Q.S. dalam Surat An-Nur (24):61)

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu.

Ayat tersebut menginformasikan bahwa tidak ada halangan bagi umat muslim untuk berkumpul bersama-sama dengan kaum disabilitas, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Hal ini menandakan dan membuktikan bahwa adanya kesetaraan bagi kaum disabilitas dan menganjurkan pula kepada kita agar tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan para kaum disabilitas. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.

Ayat ini pula secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas.

Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

Berkaitan dengan ayat 61 di atas, Rasulullah bersabda :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغَهَا بِذَلِكَ⁹

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta’ala. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, tapi justru sebagai tangga bagi tercapainya derajat yang tinggi.

Pada kajian *fiqh siyasah*, terdapat empat bidang kajian salah satunya yakni siyasah dusturiyah yang mencakup salah satu persoalan dan ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan masalah-masalah imamah atau khilafah yang membahas tentang pemimpin dalam Islam, kewajiban dan haknya, serta syarat-syarat menjadi pemimpin di dalam Islam. Di dalam pembahasan syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam dijelaskan bahwa pemimpin harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas.¹⁰

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 497.

¹⁰ <http://syarat-menjadi-pemimpin-dalam-Islam> (di akses pada tanggal 21 Februari 2019)

Sejalan dengan kajian siyasah dusturiyah di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR lebih memperhatikan lagi materi muatan dalam Undang-undang tersebut dan segera dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terkait muatan materi di Undang-undang tersebut khususnya di pasal 5. Jika ditinjau dari segi teori dalam hak-hak berpolitik, hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu ataupun diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara.¹¹

Namun faktanya sering ditemukan sebuah ketidakadilan dalam persamaan hak-hak berpolitik, dimana penyandang disabilitas sedikit diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam menyelenggarakan Pemilu. Hak berpolitik dalam Islam menjelaskan semua umat mempunyai hak dalam berpolitik, hal itu berbeda dengan faktanya masih banyak hak politik khususnya penyandang disabilitas yang dikucilkan dan tidak diberi kesempatan yang sama dalam menyelenggarakan politik.

Ketidakadilan hanya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, dimana orang yang salah diberi amanah, sedangkan orang yang benar dituduh sebagai pembuat onar. Ketidakadilan akan semakin mempercepat terjadinya kericuhan, kegaduhan bahkan kehancuran jika dilakukan oleh seorang pemimpin atau penguasa, sementara tidak ada satu pihak pun yang memberikan pertimbangan pendapat.

¹¹A. M. Saefudin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 17.

Kecamatan Labuhan Ratu sebagai salah satu wilayah kota Bandar Lampung yang juga menjadi penyelenggara pemilu pada tahun 2019. Salah satu anggota PPK kecamatan Labuhan Ratu yang memiliki keterbatasan fisik diperbolehkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara dalam pemilu 2019.

Untuk itulah maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Hak penyandang disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi PPK Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini penulis akan meneliti dan mengkaji pelaksanaan pemilu tingkat kecamatan yang melibatkan salah seorang disabilitas dilihat dari hak-haknya untuk menjadi anggota Pelaksana Pemilih Kecamatan khususnya di Kecamatan Labuhan Ratu pada Pemilu 2019.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana hak penyandang disabilitas menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap hak penyandang disabilitas menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak penyandang disabilitas menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap hak penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019.

G. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah dalam permasalahan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hak penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menelusuri fenomena dan memperoleh data dari lapangan sehubungan dengan hak penyandang disabilitas menjadi anggota PPK di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019, dan peneliti ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti hak penyandang disabilitas menjadi anggota PPK di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pemilu 2019 ditinjau dari *fiqh siyasah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan yang menjadi objek gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Hak penyandang disabilitas menjadi anggota PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.

3. Sumber Data

Bila dilihat dari segi sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi dari penelitian tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hak penyandang disabilitas menjadi anggota panitia pemilihan di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sumber

sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹² Yang terkait dengan penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (informan) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit. Sumber data yang utama yaitu pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu penelitian. Data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang-undang, dan peraturan jenis lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B* (Bandung: Alfabet, 2008), h. 295.

¹³ *Ibid.*, h. 80.

bersumber dari buku-buku, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan mengulas dan mencatat secara sistematis kejadian atau fenomena yang sedang diteliti.¹⁴ Teknik observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengamati hak penyandang disabilitas menjadi anggota panitia pemilihan di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung (studi di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung).

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data-data penulis terkait penelitian tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hak penyandang disabilitas menjadi anggota panitia pemilihan di Kecamatan

¹⁴Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Pembahasan Kualitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 125.

Labuhan Ratu, Bandar Lampung (studi di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung).

c. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon secara langsung, dimana interaksi yang terjadi antara pewawancara dan obyek penelitian ini menggunakan *interview* bentuk terbuka sehingga dapat diperoleh data yang lebih luas dan mendalam.¹⁵ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpadu atau terpimpin, atau istilah lain kebebasan dalam wawancara dibatasi oleh bahan yang telah disiapkan (*guide interview*). Wawancara dilakukan dengan beberapa anggota KPU Kota Bandar Lampung dan Hamid Fahmi salah satu Anggota PPK yang merupakan penyandang disabilitas. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hak penyandang disabilitas menjadi anggota panitia pemilihan di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung (studi di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung).

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan

¹⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1998), Cet. VIII, h. 104.

pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.¹⁶ Dalam penelitian mengenai hak-hak penyandang disabilitas menjadi anggota PPK kecamatan Labuhan Ratu.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan men-sistematika data berdasarkan urutan masalah kemudian hasil data yang telah diedit disusun dan di kelompokkan sesuai dengan urutan masalah.

c. *Analizing*

Analizing dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan berupa, analisa dan perumusan hak penyandang disabilitas dalam Islam dan praktiknya terhadap haknya menjadi anggota PPK Labuhan Ratu.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), h. 172.

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data ini digunakan untuk menyusun, mengolah, dan menghubungkan semua data yang diperoleh dari lapangan sehingga menjadi sebuah kesimpulan.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan segera terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalan di dalam latar belakang masalah.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 204.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilihan Menurut Fiqh Siyasah

a. Pengertian Hak Dzawil Ahat

Dzawil Ahat atau yang bisa disebut penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat* (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 96.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas.¹⁹

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:²⁰

- a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:²¹

- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-

¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 Ayat (1).

²⁰ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 17.

²¹ *Ibid.* h.18.

muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

Nilai-nilai universalitas Islam seperti *al-musawa* (kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyyah* (kebebasan) dan semisalnya, sebagaimana

Keputusan Mukhtar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri menjadi landasan atas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Islam memandang semua manusia adalah setara, yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas, terutama fasilitas beribadah, bagi keterbatasan yang mereka alami.

Al-Qur'an mengisahkan perihal interaksi Nabi Muhammad yang dianggap kurang ideal kepada seorang sahabat tunanetra sehingga Allah menegurnya dalam firman-Nya sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ ۚ أَلْذِكْرَى ۚ أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى ۚ فَآَنَتْ لَهُ تَصَدَّى ۚ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبَ ۚ وَآَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ وَهُوَ يَخْشَى ۚ فَآَنَتْ عَنْهُ رَأْفَتُ رَبِّهِ ۚ كَلَّا إِنَّمَا يَذْكُرُ ۚ

(Q.S. dalam Surat 'Abasa (80):1-11)

Artinya: “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan”.

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat 'Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin

Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan sebab Nabi sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa di atas kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa.²²

Semakin jelas melihat sababun nuzul Surat ‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya. Dalam hadis Abu Daud disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيُبْلَغَهَا بِذَلِكَ²³

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut’”

Hadis ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta’ala. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, tapi justru sebagai tangga bagi tercapainya derajat yang tinggi.

²² Al-Mahalli, *Imam Jalaludin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 89.

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 497.

Keteladanan lain yang diajarkan oleh Rasulullah adalah melarang umatnya untuk merendahkan atau mentertawakan mereka yang lahir tak sempurna. Suatu hari, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, yang juga merupakan orang yang paling pandai dalam menafsirkan al Quran, memanjat sebuah pohon. Seketika angin terhembus sehingga kaki Abdullah terlihat. Beberapa sahabat yang melihat tertawa. Namun Nabi menegur mereka dengan berkata, *"Apa yang membuat kalian tertawa? Ketahuilah bahwa di hari pembalasan kedua kaki Ibn Mas'ud akan lebih berat di timbangan daripada Gunung Uhud"*.²⁴

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis di atas dapat diperoleh pengetahuan bahwa hak dzawil ahat adalah sama seperti orang-orang pada umumnya bahkan dalam beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW sesungguhnya Islam lebih memuliakan para penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

b. Dasar Hukum Tentang Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilih

Pemilu merupakan suatu persoalan baru yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum, masalah ini juga bisa dikategorikan dalam masalah *ma ta'ummu bihil balwa* atau perkara yang menimpa masyarakat luas, bahkan di beberapa negara yang dulunya tidak ada pemilihan umumpun, sekarang mulai memberlakukan aturan itu walaupun hanya di beberapa lini

²⁴ Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Rasulullah* (Jakarta: Ummul Quro, 2004), h. 512.

pemerintahannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah pemilu merupakan masalah yang penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya seperti mengenai dasar hukum hak dzawil ahat menjadi anggota pelaksana pemilih dalam pemilu.

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, yang termasuk bagian dasar adanya pemilu dalam suatu negara. Hak dzawil ahat juga dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pengumpulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi.²⁵

Elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi *as-Syura*, *al-Musawah*, *al-'Adalah*, *al-Amanah*, *al-Masuliyyah* dan *al-Hurriyyah*. Elemen-elemen tersebut akan diuraikan sebagai berikut.²⁶

1. *As-Syura*

As-Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam firman Allah yang berbunyi:

²⁵ Sodikin, *Jurnal Pemilihan Umum Menurut Islam* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 60.

²⁶ *Ibid.*

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ (Q.S. As-Syura (42):38)

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka. dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Allah pula berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (Q.S. Ali-Imran (3):159)

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Kedua ayat di atas menjelaskan arti dari sikap berpolitik. Artinya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, adalah seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahlul halli wal- 'aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.²⁷

²⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 255.

Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya.

2. *Al-'Adalah*

Al-'Adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (Q.S. An-Nahl (16):90)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam al-Qur'an, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan, bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika "orang kecil" melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melanggar itu "orang besar" maka dibiarkan berlalu. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

3. *Al-Musawah*

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (Q.S. Al-Hujuraat (49):13)

²⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 256.

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah.

4. Al-Amanah

Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (Q.S. An-Nisa (4):58)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)*

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, oleh karena itu jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

5. *Al-Masuliyah*

Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Rasulullah bersabda dalam hadisnya:

عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ

رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ

مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ²⁹

Artinya: “Dari Ibn Umar R.A dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu/pekerja rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya”

Adanya prinsip pertanggungjawaban (*al-masuliyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat).

6. *Al-Hurriyyah*

Al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam

²⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Muslim*, (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 307.

rangka *amar ma'ruf nahi munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Allah berfirman yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(Q.S. Al-Baqarah (2): 256)

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Berdasarkan keenam prinsip pokok demokrasi Islam di atas, menjadi sebuah acuan dalam kehidupan berdemokrasi baik peranan kita sebagai pemimpin, penyelenggara, ataupun masyarakat diwajibkan melaksanakan keenam prinsip di atas agar terciptanya suatu kedaulatan dalam bernegara.

Ketentuan *Fiqh* mengenai penyandang disabilitas menegaskan bahwa, penyandang tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (*taklif*) selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisinya. Mereka diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya dengan tanpa mengurangi nilai *afdlaliyyah* sedikitpun.³⁰ Lebih spesifik Al-

³⁰ M. Khoirul Hadi, *Jurnal Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, Vol. 9, 2016, h. 8.

Quran secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(Q.S. An-Nur (24):61)

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi, dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syaikh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayat al-Ahkam bahwa,

substansi firman Allah Ta'ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para hamba-nya.

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah karena sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti masyarakat biasa pada umumnya.

Berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan di atas menjadi landasan mengenai ketentuan hukum penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan berdemokrasi salah satunya menjadi anggota pelaksana pemilih dalam pemilu.

c. Syarat-Syarat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilih

Adapun syarat-syarat menjadi anggota pelaksana pemilih dalam Islam merujuk kepada syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, hal ini dikarenakan tujuan dibentuk dan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk memilih seorang pemimpin. Struktur tiap-tiap penyelenggara pemilu pula dipimpin oleh ketua masing-masing baik PPK, PPS, dan KPPS, artinya syarat-syarat yang dapat dijadikan rujukan bagi pemilihan atau perekrutan

anggota dan ketua PPK dapat merujuk pada syarat-syarat pemimpin dalam Islam.

Adapun syarat-syarat dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (Q.S. An-Nisa (4):58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khatab, “Kita berhak berlaku adil dari pada kaisar”. Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 2 adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok seorang yang beriman.

2. Laki-laki adalah syarat untuk menjadi pemimpin, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (Q.S. An-Nisa (4):34)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Akan tetapi di era sekarang ketentuan mengenai wanita menjadi pemimpin sudah tidak pas lagi sehingga dalam pelaksanaannya diperbolehkan bagi wanita untuk menjadi pemimpin.

3. Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinannya.
4. Balig yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional.
5. Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah cerdas, yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan baik di era yang sangat global, karena dimasa sekarang ini jika tidak

dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdas maka akan terjadi pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat.

6. Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan menggunakan ijtihad.
7. Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu militer dan pertahanan. Kedelapan. Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinannya tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin cacat maka tidak optimal dalam menjalankannya, karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam pemerintahan.³¹

Sedangkan beberapa ciri-ciri penting yang menggambarkan pemimpin ideal dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Setia, pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah SWT.
2. Terikat pada tujuan, seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai pemimpin meliputi tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas.
3. Menjunjung tinggi syariat dan akhlaq Islam, ketika ia menjalankan tugasnya ia harus patuh pada adab-adab Islam, khususnya ketika berhadapan dengan orang yang dipimpinya (rakyat).
4. Memegang teguh amanah, seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan menganggapnya sebagai amanah dari Allah, yang disertai

³¹ Atiah Muhammad Salim, *Fi Zhilal Arsyir Rahman* (Madinah: Darut Turats, 2001), h. 86.

dengan tanggung jawab. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan selalu menunjukkan sikap baik kepada orang yang dipimpinnya.³² Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَنِ الْعَمَلِ (Q.S. Al-Hajj (22):41)

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”

5. Tidak sombong, menyadari bahwa dari kita ini adalah kecil, karena yang besar dan maha besar hanyalah Allah SWT. Sehingga hanya Allah lah yang boleh sombong. Dan kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu cirri yang patut diterapkan dan dikembangkan.
6. Disiplin, konsisten dan konsekuen, merupakan cirri kepemimpinan dalam Islam di dalam segala tindakan dan perbuatan seorang pemimpin. Sebagai perwujudan seorang pemimpin yang professional akan memegang teguh terhadap janji, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan, karena ia menyadari bahwa Allah mengetahui semua yang ia lakukan meskipun ia berusaha bagaimanapun menyembunyikanya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015

³² Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke 21* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 73.

Pasal 18 menyebutkan syarat untuk menjadi anggota PPK adalah sebagai berikut:

- d. Warga negara Indonesia.
- e. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- g. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- h. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan.
- i. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.
- j. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- k. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- m. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP. dan
- n. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- o. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- p. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- q. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
- r. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku.
2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
3. Surat pernyataan yang bersangkutan yang berisi pernyataan:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan.
 - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - g. Bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

4. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilu

Sebelum jauh membahas mengenai hak *dzawil ahat* menjadi anggota pelaksana pemilu, terlebih dahulu akan dibahas mengenai hakikat pemilu dalam Islam, karena adanya anggota pelaksana pemilu adalah bagian dari penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan pemilu merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Selain implementasi dari kedaulatan rakyat, pemilu juga dilaksanakan sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia, di samping dilaksanakan sebagai penggantian pejabat negara secara teratur.

Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, khususnya yang dipraktekkan di Indonesia maupun di negara lain. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslûb*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib.³³ Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

Berbicara kedaulatan rakyat berarti membicarakan tentang kekuasaan yang tertinggi ada pada rakyat sebagaimana dikemukakan di atas. Untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat maka harus dilaksanakan dengan pemilihan. Pemilihan semacam ini sebagai wujud dari demokrasi perwakilan

³³ Buletin Dakwah, *Al-Islam "Untuk Kita Renungkan"*, Hizbut Tahrir Indonesia, Edisi 701 Tahun XIX, diakses pada 14 Oktober 2019.

yang dikenal selama ini, karena tidak mungkin semua rakyat dapat memimpin sehingga perlunya perwakilan umat/rakyat sebagai aspirasi rakyat.

Makna kedaulatan dapat ditemukan dalam al-Qur'an Allah berfirman:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (Q.S. Ali-Imran (3):26)

Artinya: *Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".*

Menurut ajaran Islam, bahwa Allah yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah. Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (Q.S. Al-Ahzab (33):36)

Artinya: *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata".*

Islam memandang pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (*uslûb*) yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai *uslûb* adalah

mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, *uslûb* itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balancies* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, *uslûb* ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.³⁴

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya dengan diperbolehkannya pemilu maka diadakannya penyelenggaraan beserta pemilihan terhadap para penyelenggara pemilu juga diperbolehkan dalam Islam.

Adanya persyaratan menjadi anggota pelaksana pemilih sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada larangan bagi kaum disabilitas (*dzawil ahat*) untuk menjadi anggota pelaksana pemilih, yang mana *dzawil ahat* mempunyai hak-hak yang sama seperti orang-orang pada umumnya.

Keberadaan penyandang cacat fisik dalam ayat-ayat al-Qur'an yang relatif sedikit jumlahnya tidak lain disebabkan Islam memandang netral

³⁴ Kasman Singodimedjo, *Hidup Itu Berjuang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 305.

terhadap penyandang cacat fisik, dengan artian sepenuhnya menyamakan para penyandang cacat sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Dengan kata lain, kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan iman kepada-Nya.

Hal ini dipertegas dalam sebuah sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Mâjah melalui jalur sahabat Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَّا صُورَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ³⁵

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan hartamu, akan tetapi Dia melihat pada hati dan amalmu”.

Begitulah Islam lebih menekankan pentingnya amal atau perbuatan-perbuatan baik. Hal ini bisa dimaklumi, karena Islam sendiri merupakan kesatuan antara amal, iman dan ihsan yang tidak bisa dipisahkan. Jika diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai penyandang cacat fisik, ditemui bahwa ayat-ayat tersebut justru merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman. Surat Abasa ayat 1 dan 2 misalnya, secara umum berisi teguran atas sikap Rasul Saw. yang tidak ramah terhadap

³⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Muslim* (Daar Ibnu Katsir, 1423H), h. 420

seorang penyandang cacat yang datang padanya.³⁶ Ayat ini menjadi dasar tentang ajaran Islam yang menjunjung kesetaraan dengan tidak memandang tinggi rendahnya status sosial, baik laki-laki maupun perempuan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ الْوَاحِدِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan

bagi orang Arab atas orang selain Arab, kecuali dengan takwa”.

(HR. Abu Dawud).³⁷

Dengan ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa takwa yang membedakan manusia satu dengan lainnya menurut pandangan Allah dan Rasulnya, bukan masalah kebangsaan, kebangsawanan, harta ataupun kecantikan. Berbicara masalah takwa berarti berbicara tentang agama dan akhlak. Dengan demikian, bobot utama dalam masalah kafa'ah atau kufu ini adalah masalah agama dan akhlak. Adapun yang selain itu merupakan bobot pelengkap.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan, sehingga bagi kaum disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat lain pada umumnya, termasuk hak *dzawil ahat* untuk menjadi anggota pelaksana pemilu.

³⁶ Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: ar-Risalah, 2006), h. 69.

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Jalarta: Pustaka Azam, 1998), h. 97.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Gufron, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Tahun 2009 dengan judul “Fatwa Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu (Analisis Terhadap Ketetapan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III Tahun 2009)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari MUI yang mengeluarkan fatwa tentang golput yaitu keputusan MUI tentang golput yang menjadi inti kajian dari penelitian ini. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, Fatwa MUI ini masih sangat rancu karena terdapat banyak ketidaksesuaian antara isi diktum fatwa dan dalil-dalil yang digunakan dasar hukum fatwa sehingga istinbath hukumnya menjadi lemah. Politisasi fatwa dalam fatwa MUI ini sangat besar dengan melihat keberadaan lembaga MUI dan latar belakang di balik kemunculan fatwa ini. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan fatwa tidak berdampak besar.

2. Skripsi Choirun Nisa, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017 dengan judul “Hak-Hak Politik warga Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari Al-Qur’an, Hadits, dan UUD 1945. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, hak asasi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam baik dalam hukum Islam maupun Hukum Positif untuk menjadi seorang pemimpin.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. M. Saefudin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al-Mahalli, *Imam Jalaludin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar

Baru Algensindo, 2007.

Buletin Dakwah, *Al-Islam Untuk Kita Renungkan*, Hizbut Tahrir Indonesia, Edisi 701 Tahun XIX, diakses pada 14 Oktober 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Edisi keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011..

Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Pembahasan Kualitatif dalam Pendidikan*,

Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kasman Singodimedjo, *Hidup Itu Berjuang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

M. Khoirul Hadi, *Jurnal Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, Vol. 9, 2016.

Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Beirut: ar-Risalah, 2006.

Muslim bin al-Hajjaj al-Nasisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 12, hadis nomor 4651

dalam Bab Tahrim Zhalama al-Muslim wa Khadzalahu, al-Maktabah as-

Syamilah Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin*

Politik, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Darwis, *Pelaksanaan Pemilu Kepada Daerah di Kabupaten/Kota Riau tahun 2010-2011 Prespektif Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Suska Press, 2011.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahi Sunan Abu Daud*, Jilid 3, Jakarta:

Pustaka Azam, 1998.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasih,

Cet. VIII, 1998.

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta:

Imperium, 2013.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pasal 53 Tentang

Pemilu.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabet, 2008.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Untuk

Mendapatkan Pendidikan Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

Cacat Pasal 1 Ayat (1).

C. JURNAL

Sodikin, *Jurnal Pemilihan Umum Menurut Islam*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015.

Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup*

Rasulullah, Jakarta: Ummul Quro, 2004.

D. Wawancara

Ibu Ika Kartika, anggota KPU Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis,

KPU Kota Bandar Lampung, Lampung, 11 November 2019.

Dedy Triadi, anggota KPU Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis,

KPU Kota Bandar Lampung, Lampung, 11 November 2019.

E. INTERNET

Buletin Dakwah, *Al-Islam “Untuk Kita Renungkan”*, Hizbut Tahrir Indonesia, Edisi 701 Tahun XIX, diakses pada 14 Oktober 2019.

Tony Prasetyantono. Hak asasi manusia. (On-Line), tersedia di: <http://www.kompas-cetak/0108/05/HakAsasiManusia>, (di akses pada tanggal 21 Februari 2019)

<http://syarat-menjadi-pemimpin-dalam-islam>, (di akses pada tanggal 21 Februari 2019)

KPU, Fondasi Tata Kelola Pemilu. (On-Line), tersediadi : [http://www.kompas-cetak/0108/05/Fondasi Tata Kelola Pemilu](http://www.kompas-cetak/0108/05/FondasiTataKelolaPemilu), (di akses pada tanggal 21 Februari 2019)

